

Contoh dan Cara Menyusun Surat Perjanjian Hutang yang Benar

Panduan lengkap membuat surat perjanjian hutang yang benar, sah secara hukum, dan dilengkapi contoh format siap pakai.

Contoh dan Cara Menyusun Surat Perjanjian Hutang yang Benar

Surat perjanjian hutang adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) terkait jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan ketentuan lainnya. Dokumen ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta menghindari sengketa di kemudian hari.

Artikel ini akan membahas **pengertian, unsur penting, cara membuat**, serta memberikan **contoh format surat perjanjian hutang** yang benar.

1. Mengapa Surat Perjanjian Hutang Penting?

Membuat surat perjanjian hutang memberikan banyak manfaat, di antaranya:

- **Perlindungan hukum** bagi pemberi dan penerima pinjaman.
 - **Kejelasan kesepakatan** terkait jumlah hutang, bunga, dan tenggat waktu.
 - **Menghindari perselisihan** di masa depan karena semua syarat tertulis dengan jelas.
 - **Menjadi bukti sah** jika terjadi sengketa dan dibawa ke ranah hukum.
-

2. Unsur Penting dalam Surat Perjanjian Hutang

Agar surat perjanjian hutang sah secara hukum, setidaknya harus memuat:

1. Identitas lengkap para pihak

- Nama, alamat, nomor KTP atau identitas lainnya.

2. Jumlah pinjaman

- Ditulis dengan angka dan huruf untuk menghindari salah tafsir.

3. Jangka waktu pembayaran

- Tanggal mulai dan jatuh tempo pelunasan hutang.

4. Bunga (jika ada)

- Besaran bunga dan cara perhitungannya.

5. Cara pembayaran

- Tunai, transfer bank, atau metode lain.

6. Sanksi atau denda

- Ketentuan jika terjadi keterlambatan pembayaran.

7. Tanda tangan para pihak dan saksi

- Disertai materai untuk memberikan kekuatan hukum.
-

3. Langkah-Langkah Membuat Surat Perjanjian Hutang

1. Tentukan kesepakatan awal

- Diskusikan jumlah pinjaman, bunga, dan jangka waktu.

2. Tuliskan perjanjian secara rinci

- Hindari bahasa yang ambigu.

3. Gunakan bahasa hukum yang jelas

- Tidak bertele-tele dan mudah dipahami.

4. Cantumkan identitas pihak yang terlibat

- Pastikan data sesuai dokumen resmi.

5. Tambahkan pasal-pasal penting

- Seperti ketentuan pelunasan dan konsekuensi keterlambatan.

6. Libatkan saksi

- Minimal dua orang saksi yang mengetahui transaksi.

7. Gunakan materai

- Untuk memberikan kekuatan hukum lebih kuat sesuai ketentuan perundang-undangan.
-

4. Contoh Surat Perjanjian Hutang

Berikut adalah contoh sederhana format surat perjanjian hutang yang benar:

SURAT PERJANJIAN HUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama:** Andi Setiawan
Alamat: Jl. Merdeka No. 10, Jakarta
No. KTP: 1234567890
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** (Pemberi Pinjaman).
- Nama:** Budi Santoso
Alamat: Jl. Mawar No. 5, Jakarta
No. KTP: 0987654321
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** (Penerima Pinjaman).

Dengan ini kedua belah pihak sepakat bahwa:

- Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang sebesar **Rp50.000.000** (lima puluh juta rupiah) kepada **Pihak Kedua**.
- Pinjaman akan dikembalikan paling lambat pada tanggal **30 Desember 2025**.
- Pihak Kedua** akan membayar bunga sebesar **2% per bulan**.
- Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening **Bank ABC No. 123-456-789** atas nama **Andi Setiawan**.
- Jika terjadi keterlambatan, **Pihak Kedua** wajib membayar denda sebesar **Rp500.000** per minggu.
- Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 14 Agustus 2025

Materai Rp10.000

Tanda tangan:

Pihak Pertama Pihak Kedua
(Andi Setiawan) (Budi Santoso)

Saksi:

- _____
- _____

5. Tips Agar Surat Perjanjian Hutang Kuat di Mata Hukum

- Gunakan **materai sesuai tarif terbaru**.
- Pastikan **data para pihak valid**.
- Hindari pernyataan yang multitafsir.
- Simpan salinan dokumen oleh kedua pihak.
- Libatkan notaris untuk transaksi bernilai besar.

Kesimpulan

Surat perjanjian hutang adalah dokumen penting yang tidak hanya menjamin hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan rasa aman bagi kedua pihak. Dengan menyusunnya secara benar dan lengkap, risiko sengketa di masa depan bisa diminimalisir. Pastikan setiap poin tercantum jelas dan disepakati bersama sebelum

menandatangani.